

**KAJIAN TENTANG PERAN PARTAI POLITIK DALAM UPAYA
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA DALAM
PILKADA BANTEN**

(Diterima 06 November 2017; direvisi 11 Desember 2017; disetujui 18 Desember 2017)

Damanhuri¹, Ikman Nur Rahman², Ronni Juwandi³

^{1,2,3} Dosen Program Studi PPKn FKIP ,Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email : damanhuri_huri@ymail.com

Abstrak

Posisi partai politik dalam era demokrasi saat ini sangat berperan penting dan memiliki tugas strategis dalam meningkatkan efektifitas partisipasi politik warga negara sebagai pemegang kunci kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan modern. Di Indonesia, partai politik bukan hanya sebagai mesin dan kendaraan politik yang mengantarkan wakil rakyat duduk di parlemen dan pejabat politik dalam struktur pemerintahan di Indonesia, namun bertransformasi menjadi institusi non pemerintah yang memiliki tugas dan kewajiban moral untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara. Kesadaran inilah yang menjadi pemicu meningkatnya partisipasi politik warga negara yang hadir dalam setiap dinamika kehidupan warga negara, terutama dalam keikutsertaan warga negara untuk selalu terlibat di setiap aspek kehidupan berdemokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya dan peran partai politik sebagai lembaga non pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara khususnya masyarakat Prov. Banten dalam menggunakan hak pilihnya dalam PemiluProv. Banten tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan tugas partai politik sebagai sarana pendidikan politik warga negara masih kurang terlihat perannya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan warga atas maraknya kasus politik uang dan ketidaktahuan warga tentang visi dan misi dari partai politik yang diteliti.

Kata Kunci : partai politik, partisipasi politik, warga negara

PENDAHULUAN

Sistem politik demokrasi Indonesia merupakan sistem politik demokrasi yang sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia. Cita-cita ini tidak terlepas dari falsafah, ideologi yang dapat dikategorikan sebagai keharusan normatif dalam mewujudkan eksistensi bernegara (Kantaprawira, 1977: 20). Oleh karena yang menjadi falsafah dan ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka sistem politik demokrasi Indonesia adalah sistem politik Demokrasi Pancasila.

Dalam perkembangannya, sistem partai politik di Indonesia mengalami dinamika. Pada orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menganut sistem multi partai, sehingga banyak berdiri partai politik. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 diikuti oleh 172 partai politik dan pada Pemilu berikutnya tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa orde baru, diikuti oleh 10 partai politik (<http://id.wikipedia.org>). Selanjutnya di bawah kepemimpinan Soeharto, jumlah partai politik dibatasi hanya

menjadi tiga partai politik, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam konteks saat itu, Golkar diposisikan sebagai Non Partai, sehingga struktur pemasaran dari pada partai politik di Indonesia pada saat itu lebih bersifat oligopoli dan kebijakan ini berlangsung selama masa pemerintahan orde baru yaitu tahun 1965 sampai dengan tahun 1997.

Pasca orde baru melahirkan orde reformasi yang kembali membawa perubahan pada sistem kepartaian di Indonesia. Kepartaian kembali pada sistem multi partai dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. Sebagai akibatnya banyak bermunculan partai-partai politik baru menjelang Pemilu. Pada Pemilu tahun 1999, peserta pemilu sebanyak 49 partai dari 141 Partai Politik yang mendaftar. Pada Pemilu 2004 terdapat 24 Partai dari 128 partai politik yang mendaftar di Departemen Hukum & HAM. Sementara pada tahun 2009 peserta pemilu meningkat menjadi 38

Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal khusus Provinsi Aceh.

Setiap partai politik tidak hanya bersaing dengan antar partai, tetapi juga harus bersaing dari segi kemampuan leadership atau kepemimpinan partai dan citra partai di mata masyarakat calon pemilih. Oleh sebab itu, setiap partai politik berlomba untuk menunjukkan sikap leadership yang kharismatik, citra yang baik agar dapat menarik masa dukungan. Hal tersebut diselenggarakan melalui opini publik, kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, menjual *platform* perjuangan partai, menawarkan ideologi, sampai dengan mengorbitkan tokoh-tokoh terkenal yang dianggap dapat menjadi daya tarik partai.

Ukuran dari keberhasilan partai-partai tersebut adalah partisipasi politik terhadap pemilihan umum yang semakin baik. Untuk itu partai harus dapat melahirkan dua hal yakni pemilih yang loyal dan kepercayaan terhadap partai. Loyalitas pemilih bagi setiap partai politik akan mendorong partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum. Kepercayaan pada

partai politik juga mendorong hal yang sama yakni adanya espektasi dari warga negara bahwa partai yang akan dipilih dapat memberikan perbaikan sesuai dengan *platform* partai. Dalam realitasnya memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk mempertahankan dan menciptakan loyalitas pemilih partai politik. Menurut survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (2011) tercatat hanya sekitar 20% pemilih yang loyal.

Fenomena menarik ditunjukkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Banten. Dua pasangan calon bersaing secara nyaris seimbang dengan perbedaan perolehan suara yang tipis. Masyarakat cenderung tidak hanya melihat ideologi partai politik dalam memilih pemimpin, tetapi lebih ke arah personalitas calon pemimpin, kepercayaan dan loyalitas pada partai atau pemimpin tersebut. Meskipun fenomena lain yang dicatat oleh Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan kenaikan. Pada pemilu 1999 jumlah golongan putih (golput) masih 6,3%. Angka tersebut naik menjadi 16% pada pemilu 2004, dan pada pemilu 2009 jumlah golput

meningkat secara signifikan menjadi 29,1%. Pada pemilu 2014, golput akan meningkat menjadi sekitar 40%. (Suara Pembangunan, 27 Februari 2012). Fenomena ini sejalan dengan penelitian Dalton (1996) yang menyoroiti perubahan sosial mutakhir mengenai partisipasi politik. Dalam penelitiannya mengidentifikasi lima perubahan sosial mutakhir mengenai partisipasi politik. *Pertama*, meningkatnya warga negara yang melek informasi dan kritis. *Kedua*, terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap para elit politik dan lembaga politik. *Ketiga*, semakin menurunnya loyalitas terhadap partai tradisional. *Keempat*, terjadinya penurunan pemilih dalam pemilu. *Kelima*, peningkatan dalam partisipasi politik non konvensional.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Michael (2010) mengenai fenomena *antitrust* terhadap *teory public choice*. Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sekedar sebagai institusi-institusi dan proses-proses individu berusaha memenuhi kebutuhan atau pilihan mereka yang terkait dengan barang-

barang yang dibutuhkan banyak orang atau bersifat publik. Politik dipandang bukan hanya sebagai arena memperoleh kekuasaan seperti yang digunakan dalam pendekatan politik murni; melainkan lebih dipandang sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga negara, partai-partai politik, pemerintah dan birokrat. Aturan yang harus diikuti dalam permainan politik adalah konstitusi dan sistem pemilihan. Ada pun yang menjadi pemain dalam pasar politik adalah para pemilih sebagai konsumen atau pembeli barang-barang publik, dan wakil rakyat sebagai legislatif dan politikus, yang bertindak layaknya seorang wirausahawan yang menginterpretasikan permintaan rakyat terhadap barang-barang publik dan mencarikan jalan sekaligus memperjuangkan agar barang-barang publik tersebut sampai pada kelompok-kelompok pemilih yang memilih mereka dalam pemilihan. Michael (2010) memandang bahwa pelaku diasumsikan memiliki sifat-sifat spesifik tertentu termasuk sekumpulan selera atau urutan

preferensi dan kapasitas membuat keputusan-keputusan rasional atau kemampuan untuk memilih penyelesaian terefisien atas dilema pilihan yang dihadapinya. Bila fenomena-fenomena ini dikaitkan dengan loyalitas pemilih yang dipengaruhi oleh lingkungan dan partai politik maka loyalitas pemilih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan partai, citra partai, kepercayaan partai serta lahirnya loyalitas pada partai atau pada figur pimpinan partai tersebut.

Masyarakat saat ini memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik berdasarkan pemimpin yang memiliki popularitas tinggi. Masyarakat sudah kurang memperhatikan atribut partai, seperti ideologi atau visi dan misi partai. Partai yang memiliki tokoh pemimpin yang populer memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan kompetisi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Fenomena seperti itu juga terlihat jelas di Indonesia, dimana perilaku pemilih masih ditentukan oleh popularitas pemimpin partai politik. Kemenangan Partai Demokrat dalam

dua periode pemilihan umum (2004 dan 2009) tidak terlepas dari popularitas yang dimiliki oleh pemimpin partainya, terutama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demikian pula pada fenomena kemenangan Joko Widodo. Namun, setelah popularitasnya menurun dan ditambah beberapa elit Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi, tingkat elektabilitasnya menurun secara drastis. Berdasarkan survei *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC), menyebutkan hanya 8,3% responden yang memilih Partai Demokrat jika pemilu digelar hari ini. Capaian itu jauh lebih rendah dari hasil pemilu 2009, yaitu 20,81% (*Kompas.com*, 17 Februari 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum sebagai bentuk tanggungjawab kewarganegaraan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas partai politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara. Sehingga rumusan judul dalam

penelitian ini adalah: “Kajian tentang Peran Partai Politik dalam Upaya peningkatan Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Pilkada Banten”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Upaya yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam pemilu, 2). Hambatan yang dialami oleh partai politik dalam mendorong partisipasi pemilih, dan 3). Upaya partai politik dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (David Siverman dalam Deddy Mulyana, 2002: 145) . Atau metodologi adalah untuk mengkaji topik penelitian. (Bognan dan Taylor dalam Deddy Mulyana, 2002: 145). Mendasarkan pada pengertian ini, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif. Maleong (2000:3), mengemukakan :

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusiis pada kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dlam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Metode kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang peran partai politik ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Disamping itu, metode kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Arikunto (1980:215), ditinjau dari lingkup wilayahnya, maka

penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya

Dengan menggunakan desain ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang peran partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Penelitian yang dilakukan secara komprehensif menggunakan fakta-fakta, sehingga untuk bisa mengungkap fakta-fakta tentang peran partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan bertatap muka dengan subjek penelitian, namun juga mempelajari latar belakang dari objek penelitian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Deddy Mulyana (2002: 201), studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu.

Dalam penelitian ini, penulis merupakan instrument penting yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial. Lebih lanjut Deddy Mulyana (2002:201) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai metode wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, (hasil) survei, dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terperinci.

Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan antar personal, artinya selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan kontak atau berhubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian, dengan demikian diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan mendapatkan data yang lebih terperinci tentang

berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Selain itu juga berusaha mendapatkan pandangan dari orang di luar sistem dari subjek penelitian, atau dari pengamat, untuk menjaga subjektifitas hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dipilih peneliti adalah kader dan pengurus DPD Partai Golkar, dan PDIP Prov. Banten. Sedangkan data sekunder yang akan dijadikan rujukan adalah berupa buku-buku, atau artikel-artikel yang sesuai dan berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data merupakan situasi yang wajar atau *natural setting* yang dapat memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen

seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2009: 280). Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa analisis data bermaksud pertama mengorganisasi kan data. Data yang terkumpul dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan, foto, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, dan mengategorikannya (Moleong, 2009: 280).

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil

observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan dapat diverifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk

data yang dimaksudkan dalam kotak-kotak matriks.

4. Verifikasi data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Deskriptif terhadap DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Prov. Banten)

Visi dan Misi PDIP mengenai tugas dan fungsinya sebagai salah satu partai yang memiliki tanggung jawab dalam hal pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara adalah sebagai berikut :

Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi

arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar partai, visi PDI Perjuangan adalah: 1) Terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. 2) Terwujudnya masyarakat Pancasila 1 juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Misi PDI Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu: 1) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai. 2) Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara. 3) Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila. 4) Menghimpun, merumuskan, dan

memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 5) Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis. 6) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. 7) Membentuk dan membangun karakter bangsa. 8) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 9) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. 10) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam NKRI. 11) Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 12) Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 51 13)

Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keberadaan partai politik ini tentunya memiliki fungsinya dalam Negara demokratis apabila fungsi partai politik berikut ini fungsional maka tidak ada istilah konflik, kecurangan, pembodohan, dan lainnya. Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentunya Partai Politik memiliki tujuan dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu ; Tujuan umum

Partai Politik adalah: 1). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2). Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3). Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4). Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus Partai Politik adalah: 1). Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 2). Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 3). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Adapun fungsi Partai Politik secara umum adalah sebagai sarana : a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai Politik di atas merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang merata dan memiliki kesadaran politik yang baik dari masyarakat selaku pemegang suara yang sah dalam kontestasi politik di Provinsi Banten

Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi

partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten Taun 2017 adalah (1). Faktor Perangsang Politik (2). Faktor Karakteristik Pribadi (3). Faktor Karakteristik Sosial (4). Faktor Keadaan Politik. Pelaksanaan Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak berlangsung tanpa adanya faktor – faktor pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat.

Dari data yang penulis dapatkan mengenai peran partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara, khususnya melalui tugas dan wewenang partai politik untuk melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan politik, ditemukan banyak hambatan yang dialami oleh partai politik itu sendiri. Beberapa hambatan diantaranya :

Masih banyak masyarakat yang belum tahu mekanisme partisipasi politik yang harus mereka ikuti dan laksanakan, serta ketidaktahuan tentang visi dan misi partai politik dari warga masyarakat itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme

partai politik dalam upayanya meningkatkan partisipasi politik warga negara masih lemah dan kurang terstruktur.

Kendala yang dihadapi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat adalah masih banyaknya tempat tinggal warga yang ada di pelosok daerah. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya upaya dari parpol untuk mensosialisasikan eksistensi partai politik ke seluruh warga di pelosok daerah di Banten.

Warga masyarakat Prov. Banten yang ada di daerah dan pelosok lebih mengenal sosok dan ketokohan dari para pejabat dan orang-orang yang sudah dikenal lama di Prov. Banten ketimbang mengenali dan mengetahui program dan visi misi partai politik yang menjadi peserta pemilu dan/atau pemilukada.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, penulis mencoba memberikan kesimpulan mengenai upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Peran serta partai politik belum

terlihat maksimal dalam hal sosialisasi politik kepada warga negara agar kesadaran politik warga negara bisa bangkit dan tumbuh sebagai pemegang kunci kedaulatan demokrasi.

Banyak kendala yang dihadapi partai politik ketika harus menjalankan kewajiba moral kepada warga negara dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi politik warga negara. Mulai dari kondisi daerah dan psikologis masyarakat yang melihat sosok atau ketokohan dari partai politik ketimbang harus mengetahui visi dan misi serta program kerja dari partai politik yang bersangkutan.

Hal di atas perlu menjadi kajian yang berkelanjutan mengenai efektifitas partai politik agar tidak hanya dianggap sebagai lembaga yang mengejar dan memperebutkan kekuasaan semata, akan tetapi tugas moral dan sosial yang melekat pada institusi non pemerintah tersebut wajib dilakukan agar rakyat kembali mempercayai eksistensi partai politik sebagai organisasi pencari dari sistem demokrasi di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Berdikarionline, 2011. *Pentingnya Pendidikan Politik Untuk Rakyat*. [online].<http://berdikarionline.com/editorial/20110407/pentingnya-pendidikan-politik-untuk-rakyat.html>. (Diakses pada, 5 Desember 2011).
- Budimansyah, D. 2009. *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokrasi*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia. 14 Mei 2009.
- Hasbullah, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koesnadi, H. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta : Seruling Massa.
- Miriam, B. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar, B. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sisitem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, Heny (2011) *Pengaruh Orientasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa Sltu Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011*. Bandung : PKN SPS UPI
- Rusadi, K. 2004. *Sistem Politik Indonesia\ Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Sartika, Rika. (2009) *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Kecakapan Partisipatoris Pemilih Pemula*. Bandung : PKN SPS UPI
- Suhat. (2009). *Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Melek Politik Warga Negara*. Bandung : PKN SPS UPI